

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMIMPIN TERHADAP BEBAN KERJA
PERSONEL SKADRON 32**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

**ANDARINI HENDRA PERTIWI
NIM 2016210215**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

Ringkasan

Personel Tentara Nasional Indonesia, sebagai alat pertahanan negara yang mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara. Sebagai implementasi dari tugas tugas tersebut personel TNI melaksanakan operasi udara dengan mengacu kepada kebijakan Panglima TNI selaku pengguna kekuatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berbasis kepemimpinan yang dibuat (*leader are made*). Penelitian dilakukan di lingkungan militer dengan metode lapang-kualitatif. Pada penelitian didapatkan hasil berupa kebijakan yang diterapkan berasal dari pengalaman, pembelajaran, dan doktrin yang baik dari organisasi militer. Pada ranah legalitas sudah ditetapkan beberapa dokumen-dokumen resmi tentang pedoman dalam mengambil kebijakan dan pelaksanaan administrasi sehingga kebijakan yang dilakukan tetap terarah. Demikian dengan penilaian kinerja dari satuan, bukan hanya dari pedoman teknis namun juga dari sikap dan etika menjadi hal yang penting.

Kata Kunci : Kebijakan, Kepemimpinan, Penilaian Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Pada konstitusi tertuang jelas bahwa status TNI di bawah naungan eksekutif. Pada pelaksanaan tugas, anggota TNI mengacu kepada kebijakan Panglima TNI selaku pengguna kekuatan.

Didalam pelaksanaan tugas perlu adanya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendorong perbaikan pembinaan personel dan tenaga manusia di lingkungan TNI, salah satunya dengan menggunakan piranti lunak dan harus disusun guna mendukung kesuksesan pelaksanaannya dalam tugas tugas pokok personel.

Salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan penilaian terhadap kinerja individu bagi setiap personel. Dimana dalam hal penilaian personel , anggota TNI dipersamakan dengan PNS melalui DP3. Dalam Penilaian Kinerja personel harus mencakup aspek yang berkaitan dengan capaian kinerja dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, keahlian dan perilaku).

Selain itu dalam rangka mendukung tugas tugas pokok tersebut, perlu adanya sebuah kegiatan administrasi sebagai penyelenggaraan organisasi baik di dalam lingkungan TNI, atau lembaga pemerintah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian maupun dalam lingkup internasional.

Untuk itu perlu dukungan administrasi umum yang baku, legal dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi penggunaan bahasa, tata cara penerbitan tulisan dinas, tata cara penyampaian tulisan dinas, tata naskah, dan formulir.

Mengingat kegiatan administrasi di lingkungan TNI memiliki ciri tersendiri dihadapkan pada berbagai fungsi yang ada di dalamnya sehingga diperlukan Pedoman Administrasi Umum Personel TNI yang penyelenggaraan administrasi umumnya perlu adanya batasan pembahasan yang menjadi ketentuan dalam kegiatan administrasi umum. Aplikasi pelaksanaannya perlu memperhatikan peranan dan ciri – ciri, asas asas penyelenggaraan administrasi umum sebagai landasan pemikiran dan pembuatan tata tulis dalam administrasi umum memerlukan ketelitian, kecermatan dan kecepatan serta ketepatan dalam pelaksanaan tugas. Dalam penyelenggaraan administrasi umum diperlukan beberapa hal atau aturan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil dan daya guna secara maksimal dalam setiap penyelenggaraan administrasi umum membutuhkan *duty, safety, dan sustainable*.

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana agar personel dapat memahami mekanisme dan tata cara penilaian.
2. Bagaimana hasil penilaian terhadap personel dapat sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam Bujuknis tentang Penilaian Kinerja.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme dan tata cara penilaian.

2. Untuk mengetahui hasil penilaian terhadap personil yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam Bujuknis tentang Penilaian Kinerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi maupun sebagai pembanding bagi peneliti yang akan melakukan dan atau sudah dilakukan serta menambah pengetahuan baru.
2. Bagi instansi penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam penilaian kinerja personel.
3. Bagi personel sendiri penelitian ini dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam meningkatkan kemampuan kinerja personel.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Administrasi Umum Tahun 2012, disahkan dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- Pedoman Pembinaan Personel Tahun 2013, disahkan dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara
- Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tahun 2012, disahkan dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara
- Buku Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2017, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
- Buku Petunjuk Teknis Tentara Nasional Indonesia Tahun 2012
- Buku Susunan Daftar Personel (DSP) Koopsau II Beserta Jajarannya Tahun 2016
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta : Bandung
- Sugiyono .2012. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif*. CV Alfabeta : Bandung